

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA LIWUTUNG
KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Oleh
Ersas A. Gahung¹
T.A.M.Ronny Gosal²
Frans Singkoh³

Abstrak

Pemuda merupakan aset bangsa, penentu arah masa depan kehidupan yang lebih baik. Keberadaan mereka menjadi energi pembaharuan dan kritis terhadap kemapanan yang menyimpang. Pemuda adalah nafas zaman, kelompok idaman ummat dan bangsa yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran mereka dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari penelitian ini, dengan beberapa informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.

Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa, pemuda selalu mengambil bagian penting di dalamnya. Pemuda adalah pelopor perubahan dimanapun berada. Peran pemuda adalah penentu sejarah perjalanan suatu bangsa. Sejarah Indonesia telah membuktikan peran pemuda tersebut. Era Kebangkitan, masa revolusi fisik 1945, masa revolusi, reformasi sebagai titik-titik kegemilangan sejarah pemuda.

Fakta Karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol adalah Energik, Dinamis, Kreatif dan Inovatif. Ada beberapa potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda, antara lain, berani, kuat secara fisik, komunikasi dan jaringan luas, pemikiran yg belum terkontaminasi (idealis), kreativitas yang tinggi, semangat dan pantang menyerah, dan punya jiwa kepeloporan. Potensi-potensi ini sejatinya memang ada dan haruslah ada dalam *soul and live* nya seorang pemuda. Hal-hal inilah yang membuat pemuda selalu tampil terdepan sebagai agen perubahan di nusantara ini sejak dahulu kala.

Namun, sampai saat ini pemuda Indonesia masih diliputi oleh persoalan yang sangat kompleks. Sebagian dari mereka masih buta huruf, tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki akses pada pekerjaan. Sebagian lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas serta terlibat dalam berbagai tindak kriminal dan berbagai persoalan sosial lainnya. Disisi lain, beberapa peristiwa tindak kekerasan seperti demo anarkis atau tawuran antar mahasiswa telah mencoreng wajah pergerakan mahasiswa dan pemuda. Banyak masyarakat merasa kecewa dan antipati dengan pola gerakan mahasiswa-

pemuda yang cenderung anarkis dan mengganggu kepentingan umum. Sebagian lagi, aktifis pemuda telah tersubordinasi oleh kekuatan lain sehingga pemuda tidak dapat mengaktualisasikan potensi dan jati dirinya.

Menurut data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah pemuda dunia saat ini telah mencapai angka 1 miliar, dan 85% berada di negara-negara berkembang. Sekitar 60% di antaranya berada di Asia termasuk Indonesia, dan 15% di Afrika dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tidak tersedianya kesempatan kerja yang layak (*decent work*). International Labor Organization (ILO) memperkirakan secara global terdapat 88,2 juta pemuda tidak mendapat pekerjaan lagi atau 47% dari 186 juta total pengangguran dunia.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan suatu kabupaten yang belum lama berdiri, dimana hal ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah kabupaten untuk selalu dapat berperan aktif terhadap berbagai pengembangan yang ada, utamanya pengembangan bidang kepemudaan. Seperti yang diuraikan pada awal tadi bahwa pemuda merupakan pilar yang sangat penting dalam satu bangunan fungsi pemerintah kabupaten, hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata "dikesampingkan" realitas keadaan pemuda yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi kecenderungan bersifat anarkis. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya suatu sistem dimana pemerintah kabupaten dalam hal pengembangan/perhatian terhadap bidang kepemudaan yang semakin melemah.

Desa Liwutung Kecamatan Pasan merupakan salah satu desa yang berda di Kabupaten Minahasa Tenggara, Menurut

pengamatan penulis berkaitan dengan pemuda, desa ini sering terjadi perkelahian antar kelompok pemuda bahkan berujung pada perkelahian antar kampung. Kondisi psikologis akibat pengangguran menyebabkan pemuda desa banyak yang mengkonsumsi minuman keras, bahkan terlihat banyak *geng* pemuda yang sangat berpotensi terjadi perkelahian, hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan undang-undang tentang pemuda, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan pemuda untuk mencegah hal-hal yang demikian, dari sini penulis melihat peran dari pemerintah kabupaten belum nampak di desa Liwutung ini padahal undang-undang jelas mengamanatkan peran pemerintah daerah itu harus nampak melalui strategi yang tepat yakni suatu pemberdayaan, pemberdayaan pemuda sendiri menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6 adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan pasal 13 menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemuda.

Masalah pokok penelitian ini adalah kurang berperannya pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi sebagaimana uraian di atas.

Atas dasar masalah pokok di atas, rumusan masalah penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: “Bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran Pemerintah

1. Konsep Peran

Menurut etimologi peran berasal dari kata “peran” yaitu “pemain sandiwara”. Peran

(*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari status apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran sehingga antara status dan peran tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain. Demikian pada sebaliknya, dimana tidak ada peran tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peran juga tidak terpisahkan pada diri manusia. Pada hakekatnya manusia mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1985: 735), peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa.

Menurut Thoha Mitha (1983: 309), peran sebagai suatu perilaku yang teratur karena suatu jabatan tertentu.

Menurut Muhamad Ali (1986: 304) menyatakan bahwa peran adalah sesuatu yang diperoleh dalam kegiatan atau yang memegang jabatan pimpinan yang terutama suatu hal atau peristiwa.

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 54) menyatakan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan.

2. Konsep Pemerintah

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
- Mendapat akhiran “an” yang menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam katas dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah memiliki hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal (Syaffie, I.K, 2003:133-134).

Menurut Marjun, (1989:122) istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas, pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada proyek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subyek.

Konsep Pemberdayaan

Secara teoritikal, pemberdayaan (empowerment) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multi-level, sebagai hasil dari interaksi individual, sosial dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu: individu, keluarga, organisasi dan komunitas, yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kualitas (equity and quality) hidup (Rappaport, 1984; Rappaport, 1987; Zimmerman, 2000 dalam Jennings et al; 32).

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, berbagai program pemberdayaan (pemuda) memiliki dua fungsi utama: pertama, program ini berfokus untuk merubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi (capacity-building), mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan kendalinya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang

kritikal dalam lingkungan sosial dan politik. Sedangkan pemberdayaan dalam level kolektif berlaku atau terjadi di dalam keluarga, organisasi, dan komunitas, dimana melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan anggota-anggotanya, memfasilitasi mereka dalam upaya-upaya perubahan, meningkatkan kesejahteraan kolektif mereka, dan memperkuat jaringan intra serta ekstra-organisasi untuk memperkuat kualitas dari intregrasi kolektif tersebut.

Masih berdasarkan Jennings et al (2006; 34-40) ada beberapa Model Pemberdayaan Pemuda: AEC (Adolescent Empowerment Model) oleh Chinman & Linney (1998) yang berbasis pada disiplin ilmu psikologi tentang perkembangan remaja dan pemuda. Model pemberdayaan ini menyebutkan bahwa pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif. Kematangan mental ini berguna terutama dalam pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan ketrampilan, dan bekerjasama dalam aksi-aksi sosial. YD&E (Youth Development and Empowerment Program Model) oleh Kim & Colleagues (1998): Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda (YD & E) ini adalah dalam rangka pencegahan dari penyalahgunaan obat terlarang dan perilaku yang beresiko, agar pemuda melakukan hal yang bermakna dalam proyek pelayanan masyarakat.

Kunci YD & E adalah peningkatan hubungan sosial yang positif dan persiapan untuk partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan publik. Prinsip utama dari YD & E adalah pengakuan bahwa kaum muda adalah aset dan sumber daya harus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu - isu keuangan.

Dalam proyek pelayanan masyarakat, menjadi peluang yang signifikan bagi pemuda untuk belajar keterampilan untuk bekerja, termasuk melibatkan proses konsultasi,

pertanggungjawaban, dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

(TP) The Transactional Partnering Model oleh Cargo et al (2003). Model ini dikonseptualisasikan sebagai proses transaksional kemitraan bersama antara masyarakat dan pemuda. Kuncinya di tangan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi pemuda untuk berkarya.

Premis utama dari model ini ialah pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan. Sebuah proses yang melibatkan dialog dan diskusi yang terbuka dan kritis, berikut aksi yang reflektif. Dalam mengembangkan program pemberdayaan pemuda, Wallerstein, Sanchez-Merki, dan Velarde (2005) menghubungkan konsep Freire tersebut dalam konsep dan praktiknya dengan teori protection-motivation behavior change.

Hasil dari EE ini meningkatkan keahlian atau skill dan pengetahuan yang men-support usaha-usaha pemuda menuju aksi menuju perubahan sosial, utamanya dimulai dari pemberdayaan diri pribadi ke dalam pengorganisasian masyarakat atau komunitas.

Sedangkan dari perspektif Kritis Pemberdayaan Pemuda sendiri menurut Jenning et al, ada enam dimensi yang menjadi syarat dari berhasilnya proses pemberdayaan pemuda:

1. Lingkungan yang ramah dan aman
2. Keterlibatan dan komitmen
3. Distribusi kuasa yang adil (tidak membedakan)
4. Keterlibatan terhadap refleksi kritis dalam proses interpersonal dan sosial politik
5. Keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan, dan
6. Terintegrasi dalam pemberdayaan di level individual dan masyarakat.

Konsep Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional,

sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.

Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. (Mulyana. 2011:12) Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Sedangkan menurut draft RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif.

Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2002:15). Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu, :

“Bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara?”

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penelitian menggunakan teori dari Jennings tentang dimensi keberhasilan pemberdayaan pemuda:

1. Lingkungan yang ramah dan aman
2. Keterlibatan dan komitmen
3. Distribusi kuasa yang adil (tidak membedakan)
4. Keterlibatan terhadap refleksi kritis dalam proses interpersonal dan sosial politik
5. Keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan, dan
6. Terintegrasi dalam pemberdayaan di level individual dan masyarakat.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemuda. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder.

Informan dalam penelitian ini yaitu Tokoh Masyarakat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara, Pimpinan Organisasi Kepemudaan, kepala desa Liwutung, pemuda desa. Para informan ini dipilih secara *purposive* didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan akan berkembang dilapangan, hal ini sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif yang dapat berubah-ubah

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maka instrumen penelitian yang utama adalah penelitian sendiri disamping itu demi mencapai keakuratan data maka digunakan kuisisioner atau daftar pertanyaan.

Kemudian dalam proses atau teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara Observasi. Dan Studi Kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pemberdayaan Pemuda

Sumber konflik di daerah dapat dipicu oleh beragam kondisi dibesar-besarkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan dan kebutuhan kelompoknya. Akumulasi klaim kepentingan antar pribadi dan kelompok masyarakat di daerah konflik yang tidak mampu diselesaikan secara baik, mengakibatkan perluasan integritas masalah dari isu yang sebelumnya kecil menjadi isu yang besar yang merebak dan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat.

Pemuda merupakan sebuah kelompok dalam masyarakat yang sering terlibat dalam pertikaian baik antar individu maupun antar kelompok pemuda, biasanya dipicu oleh banyak hal seperti minuman keras, dendam, percintaan. Pemuda desa yang tidak sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan menjadi kelompok yang biasanya menjadi penyebab kekacauan.

Dari wawancara kepada kepala desa Liwutung tentang konflik pemuda desa Liwutung dengan desa lain, beliau mengatakan :

Kejadian perkelahian antar pemuda desa Liwutung sudah terjadi sekitar 4 tahun silam, dimana ada geng-geng pemuda yang pekerjaannya tidak tetap sehingga melampiaskan dengan minuman keras dan berbuat onar. Pihak pemerintah dan pihak kepolisian sampai kewalahan, namun melalui bapak bupati, beliau merangkul pemimpinnya yang biasa disebut dengan kepala geng, dengan memberikan pekerjaan beberapa proyek untuk dikerjakan sehingga mereka mempunyai kesibukan dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Hal ini sangat efektif sehingga sejak kejadian itu sudah tidak ada lagi perkelahian antar kampung, tinggal gangguan-gangguan kecil dalam internal pemuda desa saja.

Merujuk pada UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai “Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun. Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran dan sebagainya.

Dalam konteks tersebut, generasi muda juga memiliki lima karakteristik yang berpengaruh pada aktifitasnya, yakni: Pertama, generasi muda kerap kali memiliki mental yang tidak berorientasi pada mutu. Kecenderungan tersebut diperkuat dengan keinginan untuk mencoba sesuatu tanpa berupaya untuk mendapatkan hasil yang setimpal dengan aktivitas yang dilakukan. Karakteristik ini menggejala pada hampir semua generasi muda. Mentalitas ini secara umum membentuk karakteristik generasi muda yang sekedar menampilkan figure keberanian semata tanpa memperhitungkan akibatnya.

Desa Liwutung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Selatan. Desa ini adalah salah satu desa yang memiliki masalah mengenai pemuda. Banyak pemuda yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah, hal ini sering memicu perkelahian antar individu bahkan perkelahian antar pemuda kampung.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang peran dari pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Dalam undang-undang tersebut jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan pemberdayaan pemuda dalam berbagai bidang dan memfasilitasinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi pemuda serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan

terjadi seperti gangguan keamanan dan ketertiban.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Jennings tentang dimensi keberhasilan pemberdayaan pemuda, untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui dinas pemuda dan olahraga.

1. Lingkungan yang ramah dan aman

Lingkungan yang ramah dan aman merupakan dambaan setiap orang, tinggal dalam lingkungan yang terjamin rasa keamanan adalah sesuatu yang dicita-citakan. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan salah satunya kepada TP mengatakan :

Lingkungan desa liwutung sekarang ini dapat dikatakan sudah lebih baik dibandingkan pada 2 tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya lingkungan desa terasa sangat tidak aman dimana banyak terjadi perkelahian antar pemuda. Banyak terjadi geng-geng pemuda yang pekerjaannya hanya minum-minum, jalan-jalan dan bahkan sampai mengganggu orang yang lewat dengan meminta-minta uang keamanan. Tetapi hal ini sekarang sudah mulai jarang terjadi.

Hal senada juga disampaikan oleh seorang aparat desa Liwutung. Bapak KL beliau mengatakan:

Sekarang sudah lebih baik. Situasinya sudah tidak mencekam seperti beberapa tahun terakhir, dimana terjadi banyak perkelahian dan pertumpahan darah. Melalui pihak kepolisian dan pemerintah desa sudah dapat diselesaikan.

Dari hasil penelitian yang didapat, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah dan aman, peran dari pemerintah sendiri sudah dapat dikatakan baik dimana bupati turut mengambil bagian langsung dalam menciptakan rasa aman dan nyaman.

2. Keterlibatan dan komitmen

Suatu pemberdayaan akan berhasil apabila adanya keterlibatan serta komitmen yang kuat antar si pemberdaya dan yang diberdayakan, ini merupakan suatu kesatuan

yang mutlak dibutuhkan untuk suatu tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini penulis melihat ketelibatn dinas pemuda dan olahraga dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda, menurut salah satu tokoh pemuda desa Liwutung OP mengatakan :

Selama ini dinas pemuda dan olahraga saya rasa hamper tidak ada, belum ada program pemerintah tentang pemuda yang dirasakan oleh kami pemuda desa, sebenarnya kami sangat ingin adanya kegiatan kepemudaan seperti lomba olahraga, orgranisasi kepemudaan, tetapi selama ini organisasi yang ada disini sudah tidak berjalan lagi, juga keterlibatan pemuda desa liwutung dalam organisasi kepemudaan di Kecamatan ataupun kabupaten seperti KNPI hamper tidak ada yang mewakili kami. Saya merindukan adanya kepedulian dari pemerintah kabupaten terutama dinas terkait yakni dinas pemuda dan olahraga kabupaten minahasa tenggara dapat berperan aktif dalam memberdayakan pemuda. Saya rasa ini sangat penting mengingat pemuda disini mudah sekali tergoda untuk terlibat dalam perkelahian antar kampung, tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan maka akan mudah terbujuk rayu.

3. Keterlibatan Secara Sosial Politik Untuk Melakukan Perubahan

Berbicara pemuda dan politik, tentu kita akan menjumpai sebuah jurang pemisah antara keduanya. pemuda dan politik seakan seperti air dan minyak. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan. Tak heran, jika pemuda selalu berada dalam anggapan kelompok “apatisme politik.” Sebuah kelompok yang acuh tak acuh terhadap proses politik yang terjadi.

Di luar kesadaran, anggapan ini menjadi sesuatu kebenaran yang dengan sendirinya diamini. Tiba-tiba kita dipaksa bahwa pilihan pemuda terlibat dalam politik itu adalah sebuah kesalahan besar. Padahal, itu adalah desain yang dengan sengaja diciptakan agar pemuda tidak ikut campur dengan politik.

Sebagaimana kita tahu, selama rentan waktu 30 tahun lebih di bawah rezim Orde Baru keberadaan pemuda sengaja

ditempatkan dalam asas keteraturan—baik dalam ruang organisasi maupun dalam ruang pendidikan. di era rezim Orde Baru pemuda mengalami sebuah depolitisasi secara massif dan besar-besaran. Hal inilah yang kemudian dianggap menjadi pemicu awal kenapa pemuda bersikap apolitis.

Pada perkembangan setelah era reformasi pemuda memegang peranan penting dalam dunia social politik di Indonesia, kesadaran akan besarnya potensi yang dimiliki oleh pemuda menuntut pemerintah untuk lebih lagi mengeksplorasi peran pemuda dalam melakukan perubahan dalam masyarakat.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai tentang keterlibatan pemuda dalam social politik masyarakat desa Liwutung. Menurut JK seorang pemuda di Desa Liwutung mengatakan :

Peran pemuda desa selama ini dalam politik, contohnya pilkada atau pilpres saya nilai biasa-biasa saja, pemuda yang berdomisili di desa, menggunakan hak pilih namun banyak lagi yang sekolah atau bekerja diluar desa yang tidak datang memilih. Kecuali pemilihan bupati, kebanyakan mereka harus pulang karena didesa oleh orang tua atau tim sukses dengan iming-iming sesuatu. Dalam segi social kemasyarakatan pemuda desa disini, akhir-akhir ini sudah mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, karena peran dari pemerintah desa yang meningkatkan gairah pemuda dalam melibatkan kegiatan social kemasyarakatan bahkan juga politik. Dari beberapa informan pemuda yang penulis wawancarai penulis mendapatkan jawaban yang sama.

4. Terintegrasi Dalam Pemberdayaan Di Level Individual Dan Masyarakat

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40/2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika,

budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selain itu esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa; peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Akan tetapi, sebelum memahami lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan dan program tersebut dapat dibagi menjadi dua: yakni program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang terkait langsung. Program pemberdayaan generasi muda yang langsung terkait dengan permasalahan generasi muda. Biasanya langsung berada di bawah kementerian atau dinas terkait. Sedangkan program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang tidak terkait langsung adalah program turunan yang tidak langsung memosisikan generasi muda sebagai permasalahan itu sendiri. Hal ini

biasanya dilakukan dalam bentuk lintas kementerian atau dinas tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya konflik di Desa Liwutung Kecamatan Pasan sebagian besar karena tingginya angka pengangguran pemuda di desa dan minuman keras. Dari keadaan tersebut muncul kelompok-kelompok pemuda yang masih mencari jatidiri dan sering mencari masalah dengan pemuda di desa lain.
2. Peran Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan pemuda di desa tidak maksimal khususnya dinas pemuda dan olahraga, hampir tidak ada program yang menyentuh langsung kepada pemuda namun komitmen dengan pemimpin yang baru cukup menjanjikan. Hanya Bupati yang turun langsung dan mencarikan solusi bagi pemuda dengan cara memberikan pekerjaan-pekerjaan seperti pengerjaan proyek jalan dan bangunan dengan begitu pemuda-pemuda desa mempunyai kesibukan dan boleh mendapatkan pendapatan.
3. Lingkungan yang ramah dan aman merupakan tujuan pemerintah dan masyarakat, khususnya di Desa Liwutung situasi ini sejak bupati menyelesaikan konflik dapat dikatakan kondusif.
4. Belum ada organisasi kepemudaan yang mencapai level desa, pemberdayaan pemuda seharusnya dilakukan lewat organisasi kepemudaan yang paling bawah sehingga menyentuh lapisan individu.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya membuka lapangan pekerjaan khususnya pemuda desa, pemerintah sebaiknya menggunakan tenaga anak daerah agar supaya pemuda desa mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Seperti dari hasil penelitian diatas dan beberapa

penuturan para ahli pengangguran merupakan salahsatu penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Peran Pemerintah dalam menangani masalah tersebut harus maksimal, bukan hanya pada tingkat ibukota tetapi juga harus mampu meningkatkan lapangan pekerjaan sampai di tingkat desa.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya memilih program yang langsung menyentuh kepada pemuda, selama ini program yang ada hanya menyentuh sekolah-sekolah saja, untuk pemberdayaan pemuda, pihak pemerintah khususnya dinas pemuda dan olahraga harus mampu menjalankan program pemberdayaan pemuda sesuai dengan undang-undang tentang kepemudaan, contohnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan, kegiatan olahraga dan lomba-lomba antar pemuda guna mengembangkan potensi pemuda dan menyalurkan bakat pemuda. Dengan cara ini dapat meminimalisir potensi konflik antar desa.
3. Sebaiknya Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai Polres sendiri, sekarang ini kabupaten minahasa tenggara masih bergantung dengan polres yang ada di Minahasa Selatan, dengan didekatkannya pelayanan kepolisian, akan lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
4. Perlu dibentuk organisasi kepemudaan sampai pada tingkat desa, minimal adanya karang taruna yang dapat mewakili suara pemuda dalam kemasyarakatan maupun politik, organisasi ini juga merupakan sarana untuk mengeksperisikan kreatifitas pemuda desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhamad, 1986, Kamus Bahasa Indonesia, Angkasa Bandung
- Barry N. Checkoway, & Lorraine M. Gutiérrez,. 2006,. Youth Participation and Community Change (ed:), The Haworth Press, Inc.,
- Deddy Mulyana, 2011, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Inu Kencana Syafii 2003, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta
- Jennings, 2006, Louise B. et al. "Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment." dalam Journal of Community Practice (The Haworth Press, Inc.) Vol. 14, No. 1/2,
- Lexy Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta
- Miftah Thoha, 1983. Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Gunung Agung. Jakarta
- Pamudji S., 1992. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia, Bina Cipta, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Siagian, S.P., 2003, Teori Praktek Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2002, Statika Penelitian, Alfa Beta, Bandung
- Syaie I.K., 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bandung: PT. Bumi Aksara.

Sumber-sumber lain :

- Undang-undang No. 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025
- Badan Pusat Statisttik Indonesias
- Muradi.wordpress.com